1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Pada Juli 2026 di Kota Palopo terjadi inflasi year on year (yoy) sebesar 1,48 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,40.

Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya akumulasi indeks harga beberapa kelompok pengeluaran. Secara yoy, pada bulan Juli 2026 beberapa kelompok pengeluaran mengalami inflasi: Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,49 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,68 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,72 persen; kelompok transportasi sebesar 2,35 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami inflasi sebesar 1,02 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,11 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,64 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 5,14 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,93 persen. Adapun kelompok yang mengalami deflasi adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,69 persen; dan kelompok kesehatan sebesar 0,19 persen;

Tingkat inflasi month to month (mtm) Juli 2026 sebesar -0,30 persen (terjadi deflasi) dan tingkat inflasi tahun kalender/inflasi year to date (ytd) sebesar 1,64 persen

2. Pada Agustus 2026 di Kota Palopo terjadi inflasi year on year (yoy) sebesar 1,73 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,57.

Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga beberapa kelompok pengeluaran. Secara yoy, pada bulan Agustus 2026 beberapa kelompok pengeluaran mengalami inflasi: Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,49 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,67 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,25 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,10 persen; kelompok transportasi sebesar 2,51 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami inflasi sebesar 1,33 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,10 persen; kelompok pendidikan sebesar 1 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 5,30 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,55 persen. Adapun kelompok yang mengalami deflasi adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,11 persen.

Tingkat inflasi month to month (mtm) Agustus 2026 sebesar 0,15 persen dan tingkat inflasi tahun kalender/inflasi year to date (ytd) sebesar 1,80 persen.

3. Pada September 2026 di Kota Palopo terjadi inflasi year on year (yoy) sebesar 2,27 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,98.

Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga beberapa kelompok pengeluaran. Secara yoy, pada bulan September 2026 beberapa kelompok pengeluaran mengalami inflasi: Kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,50 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,63 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,87 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 2,36 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,27 persen; kelompok transportasi sebesar 2,40 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa

keuangan mengalami inflasi sebesar 1,41 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,85 persen; kelompok pendidikan sebesar 1 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 5,34 persen; serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,22 persen.

Tingkat inflasi month to month (mtm) September 2026 sebesar 0,37 persen dan tingkat inflasi tahun kalender/inflasi year to date (ytd) sebesar 2,17 persen

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Klasifikasi permasalahan 4K :

Ketersedian Pasokan :

- Tekanan Harga Gabah dan Beras di Tingkat Retail : Tingginya harga tebus Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani akibat kelangkaan panen memicu lonjakan harga beras medium dan premium di tingkat pedagang pasar, melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
- **Eskalasi Biaya Hidup Masyarakat Rentan:** Kenaikan harga barang pokok penting (*bapokting*) memukul daya beli buruh tani dan nelayan di pesisir Luwu yang pendapatannya ikut merosot akibat kemarau panjang.

Keterbatasan Jangkauan Intervensi Fiskal: Alokasi anggaran untuk subsidi harga komoditas dalam operasi pasar masih terpusat di wilayah perkotaan (Belopa), belum menyentuh secara masif kecamatan padat penduduk yang terisolasi secara geografis (misalnya wilayah Luwu bagian pegunungan/Latimojong

Keterjangkauan harga :

- Kekeringan Lahan Sawah Tadah Hujan : Banyaknya lahan persawahan di Kabupaten Luwu yang berstatus tadah hujan mengalami penurunan debit air permukaan secara ekstrem, memicu mundurnya pola musim tanam (MT) dan ancaman gagal panen (*puso*).
- Ketergantungan Hortikultura Luar Daerah: Kabupaten Luwu masih mengalami defisit musiman untuk komoditas cabai rawit dan bawang merah. Ketika kemarau panjang melanda daerah penyuplai utama (seperti Enrekang), volume pasokan masuk ke Luwu anjlok drastis.

Minimnya Infrastruktur Logistik Pasca-Panen: Ketiadaan fasilitas penyimpanan rantai dingin (*cold storage*) milik daerah menyebabkan komoditas hortikultura lokal cepat membusuk di suhu panas ekstrem, sehingga stok penyangga (*buffer stock*) daerah tidak bertahan lama.

Kelancaran Distribusi

- Kenaikan Tarif Angkutan Informal: Terganggunya pasokan terdekat memaksa distributor mengambil barang dari jarak yang lebih jauh, memicu pembengkakan biaya bahan bakar dan biaya angkut logistik (*landed cost*).
- Penyaluran Beras SPHP yang Belum Merata: Distribusi beras penyeimbang (SPHP BULOG) masih terkonsentrasi pada mitra pedagang besar, sehingga akses masyarakat di pelosok desa untuk mendapatkan harga murah menjadi terhambat.
- Rantai Distribusi Berlapis: Panjangnya alur tata niaga dari pengepul lokal ke tengkulak

luar daerah sebelum kembali ke pasar tradisional Luwu membuat harga akhir di tingkat konsumen melonjak tidak wajar.

Komunikasi Efektif

Asimetri Informasi Pasokan **:** Ketidakpastian jadwal panen di tingkat kecamatan memicu kekhawatiran pedagang akan kelangkaan barang, yang mendorong aksi spekulasi menaikkan harga secara sepihak

Minimnya Edukasi Diversifikasi Pangan **:** Belum masifnya gerakan konsumsi pangan alternatif non-beras membuat tekanan permintaan publik tetap terfokus penuh pada komoditas beras, sehingga fluktuasi harga beras langsung mengguncang stabilitas psikologis pasar

Identifikasi Kendala Eksekusi 9 Langkah Strategis Kemendagri di Kabupaten Luwu mengalami hambatan operasional di lapangan sebagai berikut :

Pemantauan Harga dan Stok Harian : Validasi data stok riil di gudang penggilingan padi swasta kurang optimal. Penggilingan cenderung tertutup mengenai jumlah riil simpanan gabah mereka guna menghindari pengawasan harga.

Rapat Koordinasi TPID secara Rutin : Koordinasi lintas sektoral antar-dinas teknis (Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Perdagangan) terkadang masih berjalan dalam sekat birokrasi, sehingga respons kebijakan kurang taktis saat terjadi lonjakan harga dadakan

Sidak Pasar dan Gudang Distribusi : Luasnya wilayah geografis Kabupaten Luwu tidak sebanding dengan jumlah personel Satgas Pangan dan dinas terkait, menyebabkan pengawasan penimbunan barang di kecamatan luar Belopa menjadi lemah.

Penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM) : Keterbatasan pasokan komoditas segar (seperti cabai dan sayuran) dari petani lokal yang terdampak kekeringan membuat pelaksanaan GPM sangat bergantung pada ketersediaan stok terbatas dari BULOG.

Kerja Sama Antardaerah (KAD) : Skema KAD dengan daerah tetangga (sesama wilayah Luwu Raya atau Sulsel) sulit dieksekusi karena wilayah mitra juga sedang mengamankan pasokan internal mereka akibat dampak kekeringan nasional yang merata.

Realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Inflasi : Adanya keraguan dan ketakutan administratif/hukum dari aparatur daerah dalam mencairkan dana BTT untuk intervensi pasar darurat iklim, sehingga realisasi penyerapan anggaran penanganan inflasi menjadi lambat

Dukungan Transportasi dari APBD : Kebijakan subsidi ongkos angkut sulit menyasar armada truk logistik informal lokal karena kendala persyaratan administrasi pencairan keuangan daerah yang kaku.

Gerakan Menanam (Hortikultura) : Program pemanfaatan pekarangan untuk menanam cabai di tingkat rumah tangga banyak yang mengalami kegagalan akibat cuaca panas ekstrem dan terbatasnya pasokan air bersih untuk penyiraman tanaman.

Bantuan Sosial Pengendalian Inflasi:

Proses verifikasi data petani terdampak gagal panen (*puso*) membutuhkan waktu yang lama,

berpotensi menciptakan keterlambatan penyaluran bansos di saat masyarakat sangat membutuhkan stimulus.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Keterjangkauan harga untuk menjaga kestabilan harga bapok, Pemerintah Kab Luwu melalui TPID mengambil beberapa langkah strategis :

Perluasan Jangkauan Gerakan Pangan Murah (GPM) Keliling : TPID Luwu tahun 2026 mengadopsi sistem jemput bola dengan mengoperasikan armada GPM ke wilayah kecamatan yang jauh dari ibu kota Belopa. Fokus komoditas yang dijual di bawah harga pasar meliputi Beras SPHP, minyak goreng, dan gula pasir.

Penyaluran Bantuan Pangan Daerah Tepat Waktu : Bekerja sama dengan BULOG, Pemkab Luwu mempercepat penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk meredam lonjakan permintaan di pasar tradisional.

Kegiatan Operasi Pasar Tabung LPG 3 Kg sebagai Upaya mengatasi Kelangkaan LPG dan Harga Yang melebihi HET : Dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Kerjasama dengan PT. Putra Pajalesang Mandiri, PT. Cenceng Nur, PT. Gasindo Abadi Sentosa, PT. Patimang Gas dan PT. Mario Indo Gas. Yang masing-masing agen menyediakan 560 Tabung Gas LPG 3 Kg.

Guna memastikan keterjangkauan harga bahan pokok, TPID Kabupaten Luwu juga melaksanakan kegiatan :

- Pemantauan harga bahan pokok yang rutin dilaksanakan di Pasar Rakyat setiap hari;
- Pengawasan Satgas Saber Pelanggaran Harga, Keamanan dan Mutu Pangan oleh Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan (PPSKMP), Bapanas;
- Sidak berkala Harga Beras dan Minyak Goreng di Retail Modern

Ketersediaan Pasokan, beberapa upaya pengendalian Inflasi yang telah dilakukan oleh TPID Kab Luwu :

Intervensi Darurat Pompanisasi dan Sumur Bor Dangkal : Guna menyelamatkan lahan sawah yang mengalami kekeringan meteorologis, Dinas Pertanian Kabupaten Luwu mengalokasikan bantuan pompa air portabel di beberapa titik kritis tadah hujan. Langkah ini berhasil mengamankan fase vegetatif padi dan mencegah perluasan area gagal panen (*puso*).

Optimalisasi Klaster Hortikultura Lokal : Memperkuat produktivitas mini-klaster cabai di wilayah Larompong Selatan dan Suli melalui pendampingan teknologi pengairan hemat air (*drip irrigation*) untuk menjaga pasokan hortikultura harian

Guna menjaga ketersediaan Pasokan, Pemerintah Kabupaten Luwu berupaya melakukan peningkatan produksi pangan melalui :

Program Optimalisasi Lahan (Oplah) seluas 1.708 hektar dan lahan nonrawa seluas 861 hektar.

Program Bantuan Bibit Kakao, Bibit Pala, dan Bibit Kopi Arabika sebanyak 8 Juta batang bibit kakao unggul untuk pengembangan areal Perkebunan seluas 8.000 hektar, sebanyak 24.000 batang bibit pala untuk kegiatan rehabilitasi pada areal seluas 400 hektar dan, Sebanyak 500.000 batang bibit kopi arabika untuk perluasan areal seluas 500 hektar (Untuk bibit kakao, jenis seedling klon ICCRI 08 serta sambung pucuk klon SUL1, SUL2, MCC02 dan klon BB)

Bantuan Mesin Combain Harvester dari Kementrian Pertanian RI Sebanyak Dua Unit

Pembangunan /rehabilitasi irigasi pertanian Rehabilitasi Daerah Irigasi Lengkong Pini Paket 4 memiliki Panjang penanganan 11.881 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp17,89 miliar.

Pemerintah Kabupaten Luwu memberikan bantuan pompa air kepada petani yang mengalami kekeringan. Lahan persawahan akibat musim kemarau.

Menjaga ketersediaan pasokan melalui GERAKAN MENANAM Pemerintah Kabupaten Luwu terus memperkuat sektor Perkebunan melalui Gerakan Tanam Serentak sebagai langkah mempercepat hilirisasi komoditas Perkebunan sekaligus mengembalikan kejayaan kakao sebagai komoditas unggulan daerah.

Pemda Kab Luwu melakukan louncing Penyaluran Bantuan Pangan Tahun 2026 Alokasi Juli-September bagi 50,961 penerima bantuan pangan di 22 Kec Kab Luwu sebanyak 1.528.830kg dgn masing" penerima 30Kg beras (10kg/bln).

Pemkab Luwu memperkuat pengembangan ekonomi desa melalui percepatan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). kehadiran koperasi tersebut diharapkan sebagai *buffer* (penyangga) dan agregator pangan di tingkat akar rumput (akar desa), sehingga stok pangan ditingkat Desa tetap aman dan terhindar dari kelangkaan yang memicu lonjakan harga

Kelancaran Distribusi :

Guna mendukung Kelancaran Distribusi Pasokan, Pemerintah Kabupaten Luwu berupaya melakukan hal-hal sebagai berikut

Perbaikan/Pembangunan infrastruktur pertanianPembangunan jembatan Salujambu penghubung Desa. Desa Salujambu Kec Lamasi Kab. Luwu dengan Desa Lawewe Kec. Baebunta Selatan Kab. Luwu Utara Anggaran Rp. 12. Miliar.

Pemerintah Kab. Luwu mempersiapkan Pembangunan Kampung Nelayan di Desa Rantebelu Kec. Larompong.

Pemerintah Kab. Luwu merencanakan Pembangunan Bendung dan reservoir Sungai Bua dengan target kapasitas 60 liter/detil serta jaringan pipa pembawa air beku sepanjang 7,18 kilomenter

Fasilitasi Transportasi Logistik melalui APBD 2026 : Pemkab Luwu akan merealisasikan anggaran subsidi ongkos angkut untuk armada truk yang mendatangkan komoditas hortikultura (seperti bawang merah) langsung dari wilayah produsen surplus tetangga guna memotong rantai pasar yang berlapis.

Penyediaan Kios Pangan Pengendali Inflasi : Pemkab Luwu akan melakukan/ Mengaktifkan titik pangkalan penyeimbang di Pasar Sentral Belopa dan Pasar Padang Sappa yang menjual komoditas pangan pokok dengan harga acuan pemerintah secara konsisten.

Komunikasi Efektif

Dalam penguatan Koordinasi antara TPID Pemkab Luwu akan melakukan :

Publikasi Panel Harga Komoditas Harian: Mengoptimalkan penyebaran data perkembangan harga pangan riil melalui kanal digital resmi daerah agar masyarakat terhindar dari isu kelangkaan barang yang memicu perilaku belanja berlebih (*panic buying*).

Kampanye Diversifikasi Pangan Lokal: Mengajuk gerakan konsumsi pangan karbohidrat alternatif non-beras melalui penyuluhan di tingkat desa untuk mengurangi ketergantungan konsumsi beras makro selama masa paceklik kemarau, Rapat Koordinasi Inflasi Mingguan TPID Bersama dengan Kemendagri, Mengikuti High Level Meeting (HLM) TPID Tingkat Provinsi

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Program kegiatan pengendalian Inflasi pada Triwulan III Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Dinas Ketahana Pangan Melakukan GPM Mandiri di Pasar Rakyat kerja sama dengan Kios Barokah, Kios Pangan Siap sedia dan Perum Bulog Cabang Palopo. Dalam rangka stabilitas Pasokan dan Harga Pangan guna pengendalian inflasi. Komoditi yang dijual Beras SPHP Rp. 59.000/zak, terjual 165 kg, Minyak Goreng Kita Rp. 15.700/liter, terjual 480ltr.

Pemantauan stok dan kualitas pangan agar dilakukan secara intensif oleh TPID termasuk melaksanakan inspeksi mendadak ke pasar bersama dengan Forkopimda di beberapa pasar di Kabupaten Luwu

Setiap Minggu I, II, II, IV di tiap Bulan Dinas Perdagangan dan Dinas Ketapang melakukan pemantauan harga bapok yang dilakukan oleh petugas enumerator.

Pemerintah Kabupaten Luwu memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan berkepanjangan dan dampak cuaca ekstrem yang mulai dirasakan di sejumlah wilayah. Data Dinas Pertanian Kabupaten Luwu memiliki sekitar 34.000 hektare lahan baku sawah. Dari jumlah tersebut, sekitar 22.000 hektare berada dalam kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), untuk mengantisapi lahan kering Pemerintah Daerah menyalurkan Bantuan Pompa Air melalui dana BTT TA 2026 kepada 37 Kelompok tani di Kab Luwu.

Kamis, 13 Agustus 2026 : TPID Kab Luwu melaksanakan Laounching Penyaluran Bantuan Pangan Alokasi Juli – September 2026 di gudang Bulog Pammanu Kec Belopa Utara. Jumlah penerima bantuan pangan 50.961 KPM. Penyeluran beras dilakukan di 22 Kecamatan di Kab Luwu sebanyak 1.528.839kg, dengan masing-masing menerima 30kg beras(10kg/bulan). (https://mediacenter.luwukab.go.id/bantuan-pangan-2026-diluncurkan-serentak-luwu-dapat-alokasi-untuk-50-961-penerima/)

pemerintah Kabupaten Luwu terus mendorong peningkatan produktivitas pertanian melalui program Optimalisasi Lahan (Oplah). Upaya tersebut ditandai dengan panen perdana lahan reguler dan Oplah masa tanam April–September 2026 di Desa Rante Damai, Kecamatan Walenrang Timur, Kamis, 17 September 2026. Panen perdana ini dilaksanakan pada lahan yang dikelola Kelompok Tani Taman Harapan dengan menggunakan varietas padi Ciherang produktivitas riil pertanaman mencapai 8,9 ton per hektare, dengan hasil ubinan sebesar 11,2 ton per hektare. (Media Center Kab. Luwu)

Terkait kelangkaan BBM Pemerintah Kabupaten Luwu melakukan Rapat dengan Forkopimda, PT. Pertamina Patra Niaga Wilayah Kab Luwu, Kepala SPBU Se Kab Luwu untuk membahas kelangkaan BBM dan memberikan sanksi kepada pelaku yang menyalah gunakan BBM Subsidi. Untuk penyaluran BBM dilapangan dikeluarkan Surat Edaran terkait hal tersbut dengan memberlakukan Pengisian dengan Plat Ganjil – Genap. (https://mediacenter.luwukab.go.id/bupati-luwu-pertegas-penyaluran-bbm-subsidi-untuk-lindungi-hak-masyarakat/)

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi Kabupaten Luwu pada Triwulaan III Tahun 2026 Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Kab Luwu, maka Pemerintah Kab Luwu merekomandasikan kebijakan pengendalian inflasi sebagai berikut :

1. Adanya Gerakan Pangan Murah di Bulan-bulan yang diprediksi akan mengalami kenaikan berdasarkan seri data yang ada;
2. Kontrol dan pengawasan harga pasar terkait penetapan harga di tingkat distributor karena adanya indikasi permainan harga yang tinggi khususnya pada komoditas tertentu (Bawang Merah, Bawang Putih, Telur, Beras);
3. Melaksanakan operasi pasar dan sidak pasar secara berkala untuk memastikan ketersediaan stok dan harga tertinggi serta tidak ada penimbunan barang.
4. Meningkatkan pelaksanaan 9 langkah/upaya konkret pengendalian inflasi daerah yaitu :
5. Pematauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia;
6. Rapat teknis tim pengendalian inflasi daerah;
7. Menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting;
8. Pencanangan gerakan menanam;
9. Melaksanakan operasi pasar murah bersama Dinas terkait:
10. Melaksanakan sidak pasar dan distributor agar tidak menahan/menimbun barang;
11. Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan;
12. Merealisasikan Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam menangani kedaruratn inflasi di musim kemarau el nino saat ini.
13. Membantu biaya angkutan barang/transportasi APBD kebutuhan pokok dengan menggunakan anggaran Daerah